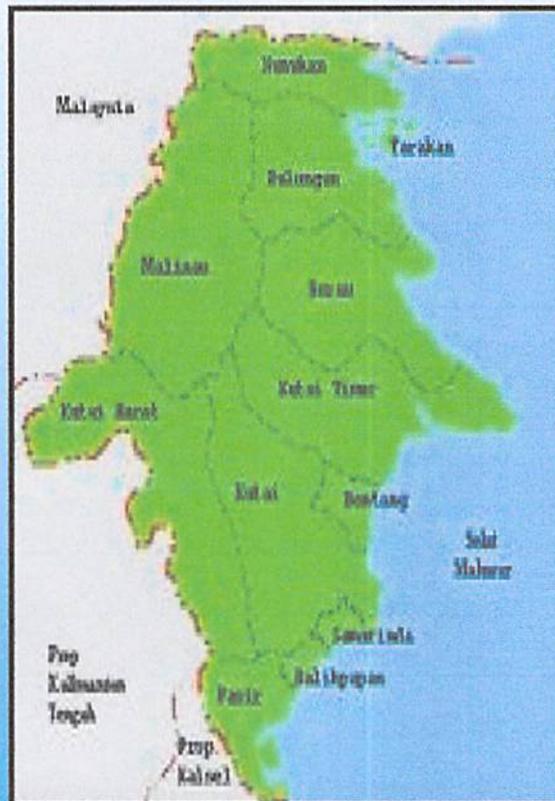




RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2021

INSPEKTORAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR



SAMARINDA 2020

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	9
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	22
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	22
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	28
	3.3. Progran dan Kegiatan	29
BAB IV	PENUTUP	36

LAMPIRAN :

- Agenda Kinerja OPD Tahun 2021
- Analisis Gambar Tupoksi Perangkat Daerah
- Lampiran – Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik (*Strategic plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta laporan pertanggung jawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas kinerja.

Rancangan Awal Rencana Kinerja Ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rancangan Awal Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rancangan Akhir Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan telah disesuaikan dengan Rencana Awal Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2021.

2.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya

landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Permedagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur. Penyusunan Rencana Kerja ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah.
- b. Kebutuhan daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
- i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4. Sistematikan Penulisan

Dalam penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja ini diawali dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra PD.**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab IV Penutup

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sesuai dengan program dan kegiatan baik yang telah dicapai sesuai target, tidak memenuhi target maupun yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	100
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	2	Dalam proses penilaian	0
3.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

4.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	29	28	96,56
5.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tndak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	80	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta selalu melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Jumlah perangkat daerah yang berkinerja tinggi ditergetkan 2 perangkat daerah, sedangkan untuk pencapaiannya dalam bulan Desember 2019 masih dalam proses penilaian. Perangkat daerah yang menjadi penilaian ada 3 perangkat daerah ,

yaitu RSUD Kanujoso Balikpapan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PD serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim, pada tahun 2019 ditarget berada pada Level 3 sedangkan untuk pencapaiannya sampai dengan bulan Desember 2019 masih dalam penilaian oleh Tim Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan hasilnya masih dalam proses penilaian.

Untuk persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP, yang ditarget pada tahun 2019 ini mencapai 80%, maka sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah dicapai 80% dengan demikian maka capaian terhadap yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	160
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Kab/Kota	5	4	80

Pada tahun 2019 telah ditetapkan jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat sangat tinggi dalam Evaluasi KPPD sebanyak 5 Kab/Kota, maka berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terhadap EKPPD 10 Kab/Kota se Kalimantan Timur telah dicapai predikat sangat tinggi terhadap 8 Kab/Kota. Hal ini sesuai dengan hasil validasi yang dilaksanakan oleh Tim dari Kementerian Dalam Negeri dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.548/2019 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Penetapan Status dan Perangkat Kinerja Sementara Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur Tahun 2018, yaitu :

1. Kota Samarinda, 3.5101 (ST)
2. Kota Bontang, 3.4701 (ST)
3. Kabupaten Berau, 3.3642 (ST)
4. Kabupaten Kutai Kartanegara, 3.2912 (ST)
5. Kota Balikpapan, 3.2479 (ST)
6. Kabupaten Penajam Paser Utara, 3.0420 (ST)
7. Kabupaten Paser, 3.0241 (ST)
8. Kabupaten Kutai Timur, 3.0181 (ST)
9. Kabupaten Kutai Barat, 2.9690 (T)
10. Kabupaten Mahakam Ulu, 2.2931 (T)

Pada tahun 2019 jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori " B" diterget sebanyak 5 Kab/Kota dari 10 Kab/Kota atas Laporan SAKIP Kab/Kota. Dari hasil evaluasi SAKIP kab/Kota yang sudah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap 5 Kab/Kota adalah :

1. Kota Bontang dengan capaian BB
2. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan capaian B
3. Kabupaten Berau dengan capaian B
4. Kabupaten Kutai Timur dengan capaian B
5. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian CC

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya pencapaian yang melebihi target, yaitu pada Pemerintah Kota Bontang dengan capaian BB dari target yang ditetapkan B, dengan 3 Kabupaten sudah mencapai target B adalah Kabupaten

Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur dan sedangkan 1 Kabupaten yang mencapai CC, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100
2.	Persentase pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti	%	80	65	81,25
3.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	60	58.71	97.85
4.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	15	15	100
5.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	65	66,76	102,71
6.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	OPD	1	0	0

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditarget dapat ditangani sebesar 100%, maka dapat dicapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari semua pengaduan masyarakat yang masuk atau dilaporkan melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah ditangani semua.

Persentase tingkat kepatuhan atas penyampaian Laporan harta kekayaan PNS baik lewat LHKPN dan LHKASN pada tahun 2019 ini ditarget tingkat kepatuhannya sebesar 60%, namun sampai saat ini tingkat kepatuhan yang dicapai sebesar 58,71 %. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan PNS terhadap penyampaian Laporan harta kekayaannya. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan PNS ini perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap PNS yang tidak patuh dalam penyampaian laporan harta kekayaannya.

Jumlah pelaporan penerimaan Gratifikasi yang ditarget pada tahun 2019 sebanyak 15 laporan, ternyata dapat dicapai laporan yang ditangani sebanyak 15 laporan. Laporan ini berasal dari Karyawan dan Karyawati RSUD Kanujoso Balikpapan, dimana RSUD Kanujoso sudah ditetapkan Zona Integritas sebagai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Dalam hal meningkatkan pelaporan penerimaan atau penolakan terhadap Gratifikasi perlu kesadaran dari penerima gratifikasi untuk melaporkan atau menolak dari gratifikasi yang sudah diterima.

Sedangkan untuk hasil survey penilaian integritas Pemda, pada tahun 2019 ini ditarget dengan skor 65. Sedangkan untuk pencapaiannya telah dilakukan kerjasama dengan BPS Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada bulan Agustus sd. Desember 2019 telah dilakukan penilaian/survey terhadap 5 perangkat daerah yang melakukan pelayanan terhadap public, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Biro Adbang dan Badan Pendapatan Daerah. Hasil penilaian survey sampai sebesar 66,67 skor sampai saat pembuatan laporan masih menunggu validasi dari KPK-RI.

Untuk Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM, pada tahun 2019 telah ditetapkan RSUD Kanujoso Balikpapan sebagai pilot project ZI menuju WBBM, namun sampai saat ini belum dapat predikat sebagai WBBM sesuai dengan penilaian oleh Kementerian PAN-RB. Diharapkan pada tahun 2020 ini akan dilakukan penilaian lagi untuk memperoleh predikat WBBM.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	Orang	50	44	88
2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100

Pencapaian tenaga Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 50 orang dan telah dicapai 44 Orang dengan capaian sebesar 88,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian pada tahun 2019, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 44 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari OPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

Level Kapabilitas APIP Inspektorat pada tahun 2019 ditarget pada Level 3. Untuk pencapaian ini telah dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terhadap 6 elemen yang menjadi penilaian, yaitu :

1. Peran dan Layanan.
2. Pengelolaan SDM
3. Praktek Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur dan Tata Kelola

Berkaitan dengan hasil laporan pencapaiannya masih menunggu hasil validasi dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang sampai dengan saat ini masih melakukan penilaian.

Sedangkan hasil rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagaimana pada lampiran 1.

Terhadap Capaian Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai Penetapan Kinerja yang telah dibuat dan diperjanjikan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2019, yang meliputi 4 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja hal ini dapat dilihat pada tabel berikut 1 berikut :

Tabel 1

Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Tinggi	PD	2	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	2	Proses Penilaian	0
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	29	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	29	28	96.56
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	PD	29	Triwulan I	20	20	100
					Triwulan II	20	20	100
					Triwulan III	20	20	100
					Triwulan IV	20	20	100
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	5	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	5	8	160
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Kab/ Kota	5	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	5	4	80

3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	100	100	100
		Persentase Pelanggaran Disiplin Yang ditindaklanjuti	%	80	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80	65	81,25
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	60	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan VI	60	58,71	97,85
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap	15	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	15	15	100
Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	65	Triwulan I	-	-	-		
			Triwulan II	-	-	-		
			Triwulan III	-	-	-		
			Triwulan IV	65	66,76	102,71		
Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	1	Triwulan I	-	-	-		
			Triwulan II	-	-	-		
			Triwulan III	-	-	-		
			Triwulan IV	1	0	0		
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	50	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	50	44	88
		Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
			Triwulan IV	3	3	100		

Sedangkan untuk pencapaian kinerja yang bersifat pelayanan perangkat daerah akan disajikan sebagaimana Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada lampiran 2.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 setelah perubahan untuk menunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur setelah perubahan adalah sebesar Rp. 27.306.285.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.263.445.000,00 dengan realisasi per Desember 2019 sebesar Rp. 10.309.848.154,00 (91,53%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.042.840.000,00 dengan realisasi per Nopember 2019 sebesar Rp. 15.736.965.409 (98,09%). Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2019 setelah perubahan sebagai tabel 2 berikut :

Tabel 2

Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019 Posisi Desember 2019

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.516.600.000	1.419.538.765	93,60	100
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.156.600.000	1.419.538.765	93,60	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.883.800.000	1.728.804.939	91,77	100
a.	Penyediaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.535.100.000	1.399.801.998	91,19	100
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	348.700.000	329.002.941	94.35	100
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.769.700.000	1.762.513.290	99,59	100
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	862.200.000	859.985.840	99,74	100

b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	907.500.000	902.527.450	99,45	100
4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	410.100.000	381.435.950	93,01	100
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	410.100.000	381.435.950	93,01	100
5.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2.767.000.000	2.764.634.390	99,91	100
a.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2.767.000.000	2.764.634.390	99,91	100
6.	Program Pengembangan Zona Integritas	144.900.000	142.191.300	98,13	100
a.	Penerapan Zona Integritas pada SKPD	144.900.000	142.191.300	98,13	100
7.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	189.300.000	188.291.100	99,47	100
a.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	189.300.000	188.291.100	99,47	100
8.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1.597.510.000	1.596.557.450	99,94	100
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	1.597.510.000	1.596.557.450	99,94	100
9.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	3.441.625.000	3.437.630.765	99,88	100
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	226.500.000	225.062.050	99,37	100
b.	Pemeriksaan Kinerja SKPD	2.215.125.000	3.212.568.715	99,92	100
10.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	2.322.305.000	2.315.367.500	99,70	100
a.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	311.380.000	309.945.500	99,54	100
b.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	2.010.925.000	2.005.422.000	99,73	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Secara garis besar capai kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Namun sampai dengan sampai saat ini belum ada kajian terhadap Standar Pelayanan Prima (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dapat dilihat pada lampiran 2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obrik.
- c. Prioritas tahun 2019 – 2023 lingkup Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Masih terbatasnya tenaga yang profesional, khususnya dibidang pengawasan terkait dengan jabatan fungsional auditor.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut.
- c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi dibidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan meningkatkan cakupan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- d. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor / aparatur fungsional pengawasan pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah

direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2019 – 2023 dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021. Namun dari hasil rewiu yang dilaksanakan kadang-kadang belum semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Awal RKPD yang telah ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran yang terdapat berbeda, hal ini didasarkan atas adanya kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023.

Selanjutnya hasil rewiu terhadap Rancangan Akhir Awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang langsung dari usulan masyarakat belum dapat diakomodir dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, namun secara substansi program dan kegiatan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah telah terjadi penurunan kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan Pencegahan KKN, hal ini terjadi karena dengan telah dibentuknya Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Tim Reformasi Birokrasi serta dibentuknya Unit-Unit penanganan Pengaduan Masyarakat, tromol pos / kotak pos 7000 dan hal ini telah dirasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Sedangkan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021 yang sesuai Renstra sebagaimana terlampir dan dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Keputusan Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Pencegahan KKN				
	Pembangunan Zona Integritas	Samarinda	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Rp. 163.500.000,00 1 Perangkat Daerah	APBD
	Aksi Pencegahan Korupsi	Samarinda	Kegiatan Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 97.950.000,00 4 Kegiatan	APBD
	Pengendalian Gratifikasi		Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 93.400.000,00 25 Laporan	APBD
	Operasional SABERPUNGLI		Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 723.500.000,00 4 Kegiatan	APBD
	Survey Penilaian Integritas		Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 290.500.000,00 Hasil Survey 70	APBD
2.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP				
	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Samarinda	Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Rp. 436.700.000,00 Level 3	APBD
			Kapabilitas APIP Inspektorat		
3..	Program Peningkatan Sistem Pengendalian				

	Internal				
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Samarinda	Hasil Penilaian Refomasi Birokasi	Rp. 408.625.000,00 Hasilnya 75	APBD
4.	Program Pembinaan Pemda Kab/Kota				
	Pengawasan SPM pada Pemda Kab/Kota (Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat)	10 Kab/Kota	Tercapaiannya SPM pemda Kab/Kota	Rp. 550.000.000,00 10 Kab/Kota	APBN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainnya seperti Kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum. Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini baru ada 1 yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK yaitu pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan serta pada tahun 2019 akan diusulkan 2 OPD sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Pada tahun 2021 dimana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Inspektorat Daerah akan melaksanakan pengawasan SPM Pemda Kab/Kota yang anggarannya bersumber dari APBN/Dekonsentrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

a. Tujuan :

- 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**
- 2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.**
- 3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.**

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 s.d. 2023 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Program dan kegiatan adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, ppada tahun 2020 telah dtetapkan program sebanyak 10 program dengan 31 kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, yaitu :

a. Program :

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 terdiri dari program prioritas dan penunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.
7. Program Pencegahan KKN.
8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP
9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.

b. Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

a. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi

6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Reviu Atas Laporan Keuangan.

7. Program Pencegahan KKN

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pemeriksaan Khusus/Investigatif.

b. Pembangunan Zona Integritas.

c. Aksi Pencegahan Korupsi

d. Pengendalian Gratifikasi.

e. Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan.

f. Monev LHKPN dan LHKASN

g. Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH.

- h. Operasional SABERPUNGLI.
 - i. Survey Penilaian Integritas.
 - j. Pembangunan Budaya Integritas.
8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Pelatihan di Kantor Sendiri.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan.
 - c. Peningkatan Level Kapabilitas APIP.
9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Pemeriksaan Operasional OPD
 - b. Pemeriksaan Kinerja OPD
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
 - d. Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan.
 - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
 - f. Pemberian Advis dan Konsultasi.
 - g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Evaluasi EKPPD Kab/Kota
 - b. Evaluasi SAKIP Kab/Kota.
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - d. Pemeriksaan Akhir Jabatan Kepala Daerah Kab/Kota.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2021 ini lokasi penyebaran untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebesar Rp. 26.863.800.000,00 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.850.960.000,00
- Belanja Langsung : Rp. 15.012.840.000,00

Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah dibuat, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat guna mewujudkan visi dan misi serta tugas lain yang menjadi beban kerja guna menjadi Kalimantan Timur yang lebih baik dalam rangka good government dan good governance.

Sedangkan pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.827.132.560
	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	bulan	12	1.827.132.560
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			741.380.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	10	487.880.000
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	13	253.500.000

3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			1.710.400.000
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kegiatan	60	840.800.000
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	108	869.600.000
4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan			301.000.000
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	9	301.000.000
5.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja			294.000.000
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Laporan	38	294.000.000
6.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan			457.450.000
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	Laporan	17	457.450.000
7.	Program Pencegahan KKN			2.373.200.000
a.	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Laporan	20	291.600.000
b.	Pembangunan Zona Integritas	PD	1	163.500.000
c.	Aksi Pencegahan Korupsi	Kegiatan	4	97.950.000
d.	Pengendalian Gratifikasi	Laporan	30	93.400.000
e.	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Laporan	3	89.550.000
f.	Monev LHKPN dan LHKASN	Persentase	75	210.300.000
g.	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Kegiatan	4	165.800.000
h.	Operasional SABERPUNGLI	Kegiatan	4	723.500.000
i.	Survey Penilaian Integritas	Kegiatan	1	290.500.000
j.	Pembangunan Budaya Integritas	Kegiatan	2	247.100.000
8.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP			1.504.150.000
a.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Kegiatan	12	146.000.000
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Kegiatan	6	921.450.000
c.	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Kegiatan	4	436.700.000
9.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal			4.416.475.000
a.	Pemeriksaan Operasional OPD	Laporan	30	921.200.000
b.	Pemeriksaan Kinerja OPD	Laporan	4	266.500.000
c.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	3	676.800.000
d.	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Laporan	8	1.701.100.000
e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kegiatan	4	284.750.000
f.	Pemberian Advis dan Konsultasi	Laporan	15	157.500.000
g.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kegiatan	2	408.625.000
10.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota			2.052.550.000
a.	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Laporan	10	843.800.000
b.	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Laporan	5	332.102.440
c.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah	Kab/Kota	7	190.800.00
	TOTAL	-	-	15.021.840.000

Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 4.

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2021 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2021.

Diharapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan pendanaan dan penetapan kinerja/perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, RKPD Tahun 2021 dan dalam RPJMD Kalimantan Timur 2019 – 2023 serta diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Samarinda, 20 Mei 2020

Plt. Inspektur
Irbnwas. Bidang Khusus,



M. KURNIAWAN, SE, Ak, MM
NIP. 19701028 199703 1 008

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**AGENDA KERJA OPD DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL RENJA OPD TAHUN 2021
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM**

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan		Keterangan
		14 Mei 2020	Minggu I Juni 2020	
1	2	3	4	6
1.	Rapat Persiapan Penyusunan Ranc. Awal Renja SKPD			
2.	Evaluasi Renja Tahun Lalu			
3.	Penetapan Kinerja Tahun 2021			
4.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD			
5.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD			
6.	Usulan Program dan Kegiatan sesuai RKPD			
7.	Penetapan Tujuan dan Sasaran Ranc. Awal Renja SKPD			
8.	Penyusunan Ranc. Awal Renja SKPD sesuai RKPD yang telah diinput dalam Aplikasi SIPP			
9.	Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 ke Bappeda Kaltim			

Samarinda, 20 Mei 2020

Plt. Inspektur
Irbanwas. Bidang Khusus,



M. Kurniawan, SE, Ak, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19701028 199703 1 008

AGENDA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 terdapat 10 program dengan 31 kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah dibuat Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam RKA dan DPA Tahun 2021 yang akan di sesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021.

Pada tahun anggaran 2021 ini, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan melaksanakan 10 program dengan 31 kegiatan yang dituangkan dalam agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebagaimana yang telah dibuat dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja yang dituangkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terhadap administrasi perkantoran pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2021.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan terhadap peralatan dan kelengkapan sarana serta prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2021.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara lembaga daerah khususnya dalam rangka kegiatan pengawasan dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sumber daya aparatur pengawasan dalam bidang pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2021.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, yang akan dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas penyelenggaraan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini menyangkut pencapaian kinerja, program dan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2021.
5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, yang akan dilaksanakan adalah melakukan kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi atas SAKIP OPD dan Reviu LKjIP Pemda Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada bulan April dan Maret 2021.
6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan, yaitu Reviu Atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja OPD. Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi dan OPD, hal ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian Laporan Keuangan yang sudah dibuat Pemerintah Provinsi dan OPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada bulan Pebruari dan Maret 2021.
7. Program Pencegahan KKN dengan Kegiatan antara lain Pemeriksaan Khusus/Investigatif, Pembangunan Zona Integritas, Aksi Pencegahan Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan, Monev LHKPN dan LHKASN, Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH, Operasional SABERPUNGLI, Survey Penilaian Integritas, Pembangunan Budaya Integritas. Hal ini dilaksanakan dalam rangka upaya-

upaya pencegahan terhadap KKN, dan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2021. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan integritas dan Saberpungli serta Kerjasama dengan APH dengan APIP untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang bersifat KKN. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2021.

8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan Kegiatan antara lain Pelatihan di Kantor Sendiri, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan dan Peningkatan Level Kapabilitas APIP yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui peningkatan kapabilitas dengan melaksanakan Pelatihan, Diklat, Bimtek dan Workshop/Seminar serta sertifikasi pejabat fungsional auditor/P2UPD dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Pemda pada Level 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret, Juni dan September 2021.
9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal, dengan Kegiatan antara lain Pemeriksaan Operasional OPD, Pemeriksaan/Audit Kinerja OPD, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pemberian Advis dan Konsultasi serta Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan untuk meningkatkan pengendalian dan penilaian internal pada OPD yang bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut. Kegiatan ini meliputi Pemeriksaan atas tugas pokok dan fungsi OPD, Aspek Kepegawaian, Aspek Keuangan, Aspek Barang Milik Daerah / Asset yang dimiliki OPD dan Aspek Kebijakan yang dibuat OPD, Sistem Pengendalian Intern dan Asas 3 E (efektif, efisien dan ekonomis). Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, maka akan berdampak pada cakupan tugas-tugas pengawasan terutama terhadap audit universal terkait dengan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Kegiatan Pemeriksaan Kinerja selain perangkat daerah juga audit terhadap sekolah-sekolah menengah atas/kejuruan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni dan Nopember 2021.

10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota dengan Kegiatan antara lain : Evaluasi EKPPD Kab/Kota, Evaluasi SAKIP Kab/Kota dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengemban tugas Kepala Daerah / Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Juni s.d. September 2021.

Agenda kerja yang telah dibuat tersebut diatas didasarkan atas program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan rencana kerja tahun 2021. Demikian agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja, RKA dan DPA Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

ANALISIS GAMBARAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah , baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota dan dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memfasilitasi pelaksanaan pengawasan baik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Timur. Aspek strategis organisasi yang akan capai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.
5. Rencana perubahan atas PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi PP 72 tahun 2019.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 53 Tahun 2016, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai

tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

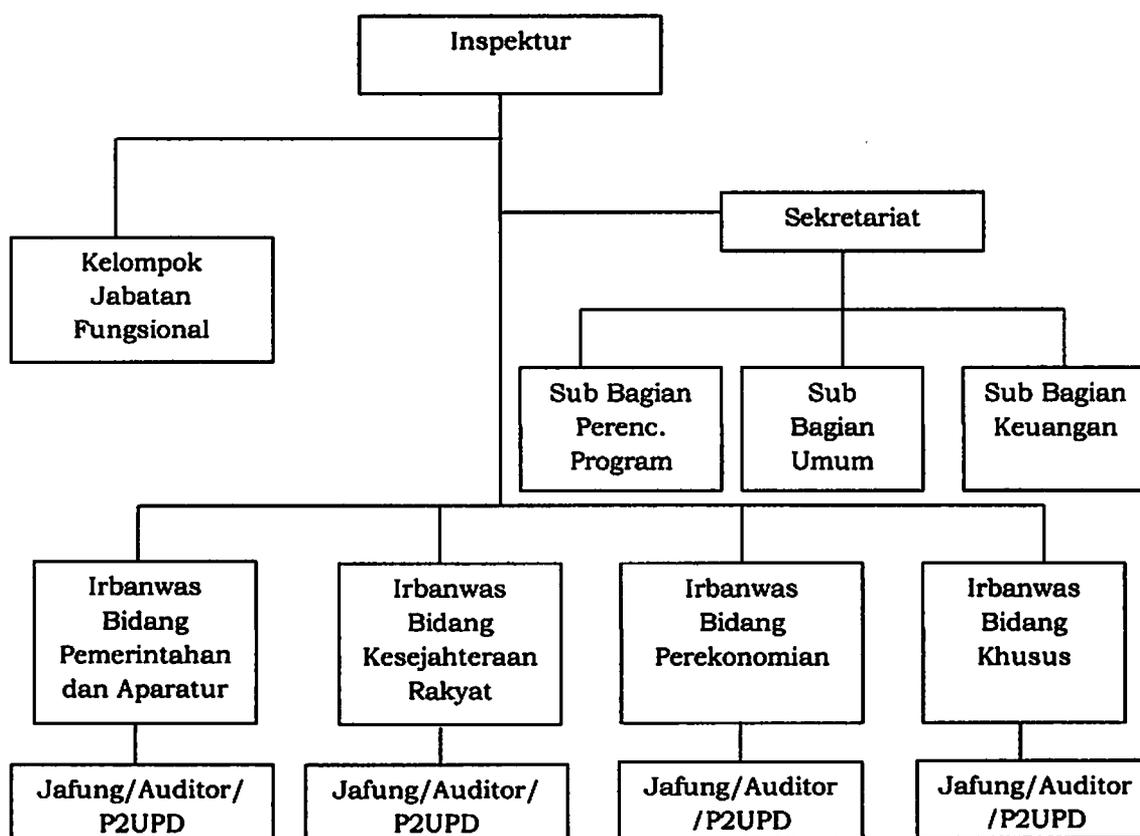
E. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



F. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan

etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 102 orang yang terdiri dari 73 orang PNS/ASN dan 29 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 102 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	26	15	7	34	-	-	9	32	-	-	-	-
Fungsional Umum	16	9	-	18	6	1	-	12	1	11	1	-
Jumlah PNS	48	27	11	57	6	1	13	49	1	11	1	-
Jumlah Honor/PTT	12	15	-	-	-	-	-	18	2	7	-	-
Jumlah PNS dan PTT	60	42	11	57	6	1	13	67	3	18	1	-

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2020

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Prog/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Urusan Pilihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-	Masih dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan, sehingga capaian belum dapat disampaikan
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Perlatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 2 Pemeliharaan Perlatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah perlatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah perlatan kantor Gedung Kantor yang tersedia	0%	0%	0	0	0%	10 Unit	-	-	
C.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	180 Kegiatan	100%	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100%	60 Kegiatan	-	-	
D.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat	35 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%	9 Dokumen	-	-	
E.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang dilaksanakan	40 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	-	-	
F.	Program Pengembangan Zona Integritas 1 Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Terbentuknya Zona Integritas pada OPD Jumlah SKPD yang akan menerapkan ZI menjadi WBK/WBBM	5 SKPD	100%	2 SKPD	1 SKPD	50%	1 OPD	-	-	
G.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN 1 Peningkatan Pengaduan Masyarakat 2 Pemertasaan Dengan Tujuan Tertentu 3 Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan KKN Jumlah pengaduan yang ditangani Jumlah pemertasaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	100 Kasus 50 Laporan	100% 100%	20 Kasus 8 Laporan	20 kasus 8 Laporan	100% 100%	20 Kasus	-	-	
H.	Program Penjaminan Mutu Laporan Keuangan 1 Review Atas Laporan Keuangan 2 Pemeriksaan Kinerja SKPD 3 Pemeriksaan Serentak/Pemeriksaan Hasil Pengadaan BU	Terselenggaranya Laporan Keuangan sesuai SAP Jumlah Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang direviu Jumlah SKPD yang diperiksa kinerjanya Jumlah kegiatan fiskal pada SKPD yang diperiksa	45 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%	17 Laporan	-	-	
I.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 2 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang dievaluasi Jumlah Laporan Kinerja Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	48 Laporan	100%	48 Laporan	48 Laporan	100%	48 Laporan	-	-	
J.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	100%	100%	90%	70%	64%	65%	-	-	

Lampiran : 2

KINERJA PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2019 - 2023)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Opini	WTP	WTP	100	WTP			WTP			WTP			WTP		
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Tinggi	2	80	Proses Penilaian	-	4			6			8			10		
3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	90	87	96,66	92			95			98			100		
4	Level Maturltas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Proses Penilaian	-	3			3			3			4		
5	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B	PD	29	28	96,56	31			33			34			36		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	%	80	80	100	85			90			95			100		
7	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	160	6			6			6			7		
8	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Kab/Kota	5	4	80	6			6			6			7		
9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100	100			100			100			100		
10	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	80	62	77,50	85			90			95			100		
11	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	60	58,71	97,85	65			70			75			80		
12	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	15	15	100	20			25			30			35		
13	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	65	68,76	102,71	70			75			80			85		
14	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zi Menuju WBK/WBBM	PD	1	0	0	1			1			1			1		
15	Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat	Orang	50	44	88	55			55			60			65		
16	Level Kapabilitas APiP Inspektorat	Level	3	3	100	3			3			3			4		

17	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	Skor	80	Masih disurvei	-	85			90			95			100		
18	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	1	Masih disurvei	-	2			3			4			5		
19	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	%	80	80	100	85			90			95			100		
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	76	78.84	103	78			80			81			82		

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO.	INDIKATOR *)	SPM / Standar Nasional	IKK (PP 6/08)	Target					Realisasi					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Belum ada

Lampiran 4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pencegahan KKN a. Pembangunan Zona Integritas	Samarinda	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Rp. 163.500.000,00 1 Perangkat Daerah	
	b. Aksi Pencegahan Korupsi	Samarinda	Kegiatan Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 97.950.000,00 4 Kegiatan	
	c. Pengendalian Gratifikasi	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 93.400.000,00 30 Laporan	
	d. Operasional SABERPUNGLI	Prov. Kaltim	Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 723.500.000,00 4 Kegiatan	
	e. Survey Penilaian Integritas	Prov. Kaltim	Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 290.500.000,00 Hasil Survey 70	
2	Program Peningkatan Kapabilitas APIP a. Peningkatan Kapabilitas APIP	Samarinda Samarinda	Maturitas SPIP Pemda Kaltim Kapabilitas APIP Inspektorat	Rp. 436.700.000,00 Level 3 Level 3	
3	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal a. Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 408.625.000,00 Hasilnya 75	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pilihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Samarinda	1 tahun	1,827,132,560			1 tahun	2,009,845,816
		Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Samarinda	12 bulan	1,827,132,560	APBD	12 bulan	2,009,845,816	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Samarinda	32 Unit	741,380,000			32 Unit	816,618,000
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Samarinda	10 Unit	487,880,000	APBD	19 Unit	538,668,000	
		Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpilih	Samarinda	13 Unit	253,500,000	APBD	13 Unit	278,850,000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda	Prov.Kab/Kota / Luar Prov.	1 Pemda	1,710,400,000			1 Pemda	1,881,440,000
		Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan	Prov.Kab/Kota/ Luar Prov.	60 Kegiatan	840,800,000	APBD	60 Kegiatan	924,880,000	
		Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	108 Orang	869,600,000	APBD	102 Orang	956,560,000	
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tereusunnnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Prov/Kab/Kota /Luar Prov.	9 Dokumen	301,000,000			9 Dokumen	331,100,000
		Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	9 Dokumen	301,000,000	APBD	9 Dokumen	331,100,000	
5	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemda	Samarinda dan Luar Prov.	Kategori > B	478,400,000			Kategori > B	526,240,000
		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Samarinda dan Luar Prov.	38 Laporan	478,400,000	APBD	38 Laporan	526,240,000	
6	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan 1 Reviu Atas Laporan Keuangan	Terjaminnya mutu laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Samarinda	WTP	294,000,000			WTP	323,400,000
		Jumlah Reviu atas laporan Keuangan yang diterbitkan	Samarinda	17 Laporan	294,000,000	APBD	14 Laporan	323,400,000	
7	Program Pencegahan KKN 1 Pemeriksaan Khusus/Investigatif 2 Pembangunan Zona Integritas 3 Aksi Pencegahan Korupsi 4 Pengendalian Gratifikasi 5 Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan 6 Monev LHKPN dan LHKASN	Terlaksananya Pencegahan KKN	Prov/Kab/Kota /Luar Prov.	10 Kegiatan	2,373,200,000			10 Kegiatan	2,610,620,000
		Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	20 Laporan	291,600,000	APBD	20 Laporan	320,760,000	
		Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Smd dan Bpn/ Luar Prov.	1 PD	163,500,000	APBD	1 PD	179,850,000	
		Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan	Samarinda / Luar Prov.	4 Kegiatan	97,950,000	APBD	4 Kegiatan	107,745,000	
		Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	25 Laporan	93,400,000	APBD	25 Laporan	102,740,000	
		Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	3 Laporan	89,550,000	APBD	5 Laporan	98,505,000	
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN	Samarinda / Luar Prov.	70%	210,300,000	APBD	75%	231,330,000			

NO.	Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Meju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7 Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	4 Kegiatan	165,800,000	APBD		4 Kegiatan	182,380,000
	8 Operasional SABERPUNGLI	Jumlah kegiatan operasional Saberpungli yang dilaksanakan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	4 Kegiatan	723,500,000	APBD		4 Kegiatan	795,850,000
	9 Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan	Samarinda / Luar Prov.	1 Kegiatan	290,500,000	APBD		1 Kegiatan	319,550,000
	10 Pembangunan Budaya Integritas	Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	2 Kegiatan	247,100,000	APBD		2 Kegiatan	271,810,000
8	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Prov/Kab/Kota /Luar Prov.	Level 3	1,504,150,000			Level 3	1,654,565,000
	1 Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri	Samarinda	12 Kegiatan	146,000,000	APBD		12 Kegiatan	160,600,000
	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	6 Kegiatan	921,450,000	APBD		6 Kegiatan	1,013,595,000
	3 Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	4 Kegiatan	438,700,000	APBD		2 Kegiatan	480,370,000
9	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terlaksananya Sistem Pongondalian Internal	Prov/Kab/Kota /Luar Prov.	7 Kegiatan	4,416,475,000			7 Kegiatan	4,858,122,500
	1 Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah laporan pemeriksaan operasional perangkat daerah yang diterbitkan	Smd/Bprn/Luar Prov.	30 Laporan	921,200,000	APBD		30 Laporan	1,013,320,000
	2 Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan	Samarinda/ Luar Prov.	4 Laporan	266,500,000	APBD		8 Laporan	283,150,000
	3 Pemeniksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan.	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	3 Laporan	676,800,000	APBD		3 Laporan	744,480,000
	4 Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evatuasi pengawasan yang diterbitkan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	8 Laporan	1,701,100,000	APBD		8 Laporan	1,871,210,000
	5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan	Smd/Bprn/Luar Prov.	4 Kegiatan	284,750,000	APBD		4 Kegiatan	313,225,000
	6 Pemberian Advis dan Konsultasi	Jumlah advis dan konsultasi yang dilaksanakan.	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	20 Laporan	157,500,000	APBD		20 Laporan	173,250,000
	7 Penilaian Mandiri Reformasi Birokasi	Jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	Smd/Bprn/Luar Prov.	2 Kegiatan	409,625,000	APBD		2 Kegiatan	449,487,500
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Kab/Kota	10 Kab/Kota	1,356,702,440			10 Kab/Kota	1,503,372,684
	1 Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi EKPPD Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	Kab/Kota	10 Laporan	843,800,000	APBD		10 Laporan	928,180,000
	2 Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota	Kab/Kota	10 Laporan	332,102,440	APBD		10 Laporan	365,312,684
	3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	Kab/Kota	10 Kab/Kota	190,800,000	APBD		10 Kab/Kota	209,880,000
		Jumlah			15,012,840,000				16,514,124,000

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2021

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Peningkatan
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda Samarinda	Tertindakannya kegiatan administrasi perkantoran Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	1 tahun 12 bulan	1,827,132,560 1,827,132,560	Urusan Pihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda Samarinda	Tertindakannya kegiatan administrasi perkantoran Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	1 tahun 12 bulan	1,827,132,560 1,827,132,560	Bertasarkan hasil analisis kebutuhan, secara program dan kegiatan serta pendanaan sesuai usulan, tidak terdapat perbedaan, dan sudah seragam
2	Program Pembekalan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Perabotan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 2 Pemeliharaan Perabotan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang terdihara	Samarinda Samarinda Samarinda	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana aparatur Jumlah perabotan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terdihara	32 Unit 10 Unit 13 Unit	741.380.000 487.860.000 253.500.000	Program Pembekalan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Perabotan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 2 Pemeliharaan Perabotan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda Samarinda Samarinda	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana aparatur Jumlah perabotan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terdihara	32 Unit 10 Unit 13 Unit	741.380.000 487.860.000 253.500.000	Rancangan Awal RKPD Tahun 2021. Sudah juga dirput ke APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pemda 60 Kegiatan 108 Orang	1,710,400,000 840,600,000 869,600,000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pemda 60 Kegiatan 108 Orang	1,710,400,000 840,600,000 869,600,000	Rancangan Awal RKPD Tahun 2021. Sudah juga dirput ke APBD
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov.	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	9 Dokumen 9 Dokumen	301,000,000 301,000,000	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov.	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	9 Dokumen 9 Dokumen	301,000,000 301,000,000	Sebab adanya pengurangan pagu anggaran akan berdampak pada tidak tercapainya program dan kegiatan yang menjadi prioritas
5	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Samarinda dan Luar Prov. Samarinda dan Luar Prov.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemda Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kategori > B 35 Laporan	478,400,000 478,400,000	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Samarinda dan Luar Prov. Samarinda dan Luar Prov.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemda Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kategori > B 35 Laporan	478,400,000 478,400,000	
6	Program Perbaikan Mutu Laporan Keuangan 1 Revisi Atas Laporan Keuangan	Samarinda Samarinda	Terjampainya mutu laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Jumlah Revisi atas laporan Keuangan yang diterbitkan	WTP 17 Laporan	294,000,000 294,000,000	Program Perbaikan Mutu Laporan Keuangan 1 Revisi Atas Laporan Keuangan	Samarinda Samarinda	Terjampainya mutu laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Jumlah Revisi atas laporan Keuangan yang diterbitkan	WTP 17 Laporan	294,000,000 294,000,000	
7	Program Pencegahan KKN 1 Pemeriksaan Khusus/Investigasi 2 Pembangunan Zona Integritas 3 Aksi Pencegahan Korupsi 4 Pengendalian Gratifikasi 5 Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan 6 Monv LHKPN dan LHKASN 7 Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH 8 Operasional SABERPUNGLI 9 Survey Penilaian Integritas 10 Pembangunan Budaya Integritas	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Samarinda / Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Samarinda / Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Samarinda / Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov.	Tertindakannya Pencegahan KKN Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBSM Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani Pemeriksaan Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan Jumlah kegiatan operasional Saberpungli yang dilaksanakan Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan	10 Kegiatan 20 Laporan 1 PD 4 Kegiatan 30 Laporan 3 Laporan 65% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan	2,373,208,000 291,600,000 163,500,000 97,950,000 93,400,000 89,550,000 210,300,000 166,800,000 723,500,000 290,500,000 247,100,000	Program Pencegahan KKN 1 Pemeriksaan Khusus/Investigasi 2 Pembangunan Zona Integritas 3 Aksi Pencegahan Korupsi 4 Pengendalian Gratifikasi 5 Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan 6 Monv LHKPN dan LHKASN 7 Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH 8 Operasional SABERPUNGLI 9 Survey Penilaian Integritas 10 Pembangunan Budaya Integritas	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Samarinda / Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Samarinda / Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Samarinda / Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov.	Tertindakannya Pencegahan KKN Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBSM Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani Pemeriksaan Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan Jumlah kegiatan operasional Saberpungli yang dilaksanakan Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan	10 Kegiatan 20 Laporan 1 PD 4 Kegiatan 30 Laporan 3 Laporan 65% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan	2,373,208,000 291,600,000 163,500,000 97,950,000 93,400,000 89,550,000 210,300,000 166,800,000 723,500,000 290,500,000 247,100,000	
8	Program Peningkatan Kapabilitas APIP 1 Pelatihan di Kantor Sendiri 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan 3 Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Samarinda Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Mutu/itas SPIP	Level 3 12 Kegiatan 6 Kegiatan 4 Kegiatan	1,604,150,000 145,000,000 921,430,000 436,700,000	Program Peningkatan Kapabilitas APIP 1 Pelatihan di Kantor Sendiri 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan 3 Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Samarinda Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Mutu/itas SPIP	Level 3 12 Kegiatan 6 Kegiatan 4 Kegiatan	1,604,150,000 145,000,000 921,430,000 436,700,000	
9	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal 1 Pemeriksaan Operasional OPD 2 Pemeriksaan Kinerja OPD 3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 4 Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan 5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Smd/Bpr/Luar Prov. Samarinda/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Smd/Bpr/Luar Prov.	Tertindakannya Sistem Pengendalian Internal Jumlah laporan pemeriksaan operasional perangkat daerah yang diterbitkan Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan	7 Kegiatan 30 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 8 Laporan 4 Kegiatan	4,418,476,900 921,200,000 266,500,000 676,800,000 1,701,100,000 284,750,000	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal 1 Pemeriksaan Operasional OPD 2 Pemeriksaan Kinerja OPD 3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 4 Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan 5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Smd/Bpr/Luar Prov. Samarinda/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Prov./Kab/Kota/Luar Prov. Smd/Bpr/Luar Prov.	Tertindakannya Sistem Pengendalian Internal Jumlah laporan pemeriksaan operasional perangkat daerah yang diterbitkan Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan	7 Kegiatan 30 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 8 Laporan 4 Kegiatan	4,418,476,900 921,200,000 266,500,000 676,800,000 1,701,100,000 284,750,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemberian Advokasi dan Konsultasi	Prov/Kab/Kota, luar Prov, Smd/Spr/Luar Prov	Jumlah advokasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Laporan	157.900.000	6	Pemberian Advokasi dan Konsultasi	Jumlah advokasi dan konsultasi yang dilaksanakan	20 Laporan	157.900.000	
7	Pencarian Mandiri Reformasi Birokrasi	Prov	Jumlah kegiatan Pencarian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	400.025.000	7	Pencarian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Pencarian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	400.025.000	
10	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintah Kab/Kota	Kab/Kota	Terseleenggaranya Pembinaan dan Penguasaan Pemerintah Kab/Kota	10 Kab/Kota	1.344.702.440		Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintah Kab/Kota	Terseleenggaranya Pembinaan dan Penguasaan Pemerintah Kab/Kota	10 Kab/Kota	1.344.702.440	
1	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi EKPPD Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	10 Laporan	843.800.000	1	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi EKPPD Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	10 Laporan	843.800.000	
2	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota	5 Laporan	332.102.440	2	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota	5 Laporan	332.102.440	
3	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan penguasaan Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	7 Kab/Kota	190.800.000	3	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan penguasaan Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	7 Kab/Kota	190.800.000	
			Jumlah		18.012.860.000			Jumlah		18.012.860.000	